PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Trinov Gira Thimoteus

E-mail: trinov251197@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Financial Services Authority; Personal Data Protection; Online Loans*

Kata Kunci: *Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman Online*

Abstract

This article aims to examine the efforts of the Financial Services Authority as a financial policy industry policy-making agency to provide legal protection in cases of legal violations of customer personal data in Peer to Peer Lending-based Financial Technology services and an analysis of legal problems regarding the protection of customers' personal data in Financial services Peer to Peer Lending based technology both in terms of form and its causes. This legal research is a descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. Sources of data on research consists of primary data that is data obtained directly in the field with interviews at the Central Office Financial Services Authority precisely at the Directorate of Regulation, Licensing, and Financial Technology Supervision of related staff, then secondary data comes from reviewing official documents, books, research results which conclude that OJK provides legal protection to consumers implemented through the preventive role and repressive role of the OJK which focuses on Fintech Lending with legal and illegal legal entities based on the principles of consumer protection contained in every regulation issued by the Financial Services Authority. Data collection techniques used are field studies and literature, then the data analysis technique used is to collect data then reduce or process data, produce data presentations and so conclusions or verification are taken.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun kebijakan industri jasa keuangan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* serta melakukan analisis kepada problematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* baik itu dari segi bentuk maupun faktor penyebabnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan

kualitatif. Sumber data pada penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat tepatnya pada Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* terhadap staff terkait, kemudian data sekunder berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa OJK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada *Fintech Lending* berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.

A. Pendahuluan

Penggunaan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar memberikan dampak signifikan bagi beberapa bidang, salah satunya adalah bidang industri bisnis yang kemudian merupakan *pioneer* dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Namun, efek dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya menjalar ke industri perdagangan, tapi juga berpengaruh kepada industri keuangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya *Financial Technology* (*Fintech*).

Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* ini terdiri dari Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Mekanismenya, sistem dari penyelenggara akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa layanan ini merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

Untuk mendapatkan jasa atau melakukan proses pengajuan pinjaman pinjaman, calon nasabah atau konsumen harus mengunduh atau memasang aplikasi *Fintech Lending*. Kemudian mendaftarkan akun dengan mengisi formulir menggunakan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, foto debitur, verifikasi nomor *handphone*, rekening bank, serta kontak darurat yang menjadi jaminan dalam pinjaman *online*. Konsumen harus mencantumkan dua nomor kontak yang sifatnya spesifik, pada saat pengajuan pinjaman. Pertama, adalah *verification contact* dan yang kedua adalah *emergency contact*.

Maraknya kemunculan *Fintech Lending* sebagai alternatif jasa keuangan konvensional berbanding lurus dengan praktik pelanggaran hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan *Peer to Peer Lending*. Berbagai macam bentuk pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa pinjaman *online* meliputi pihak yang berstatus legal maupun ilegal. Contohnya, dalam kasus aplikasi pinjaman *online* legal Rupiah Plus yang meneror seluruh daftar kontak nasabahnya dan menyuruh mereka semua untuk memberitahukan kepada korban untuk segera melunasi hutang pinjaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Hal ini tentu melanggar keamanan data pribadi dan metode penagihan yang menysasar kontak-kontak ponsel nasabahnya, dikarenakan dalam klausul perjanjian penyelenggara tidak ada kalimat yang jelas menunjukkan cara seperti itu apabila terjadi gagal bayar.

Kasus pinjaman *online* selanjutnya adalah kasus pinjaman *online* ilegal yang dialami seorang karyawan asal Solo bernama Yuliati. Ia menjadi korban *Fintech Lending* dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online* bernama INCASH yang memiliki bunga tinggi dan tenor pendek. Setelah jangka waktu pengembalian uang yang dipinjamnya jatuh tempo ternyata Yuliati belum bisa membayar pinjaman tersebut. Akibatnya, setelah tiga hari gagal bayar ia selalu mendapat teror dan ancaman dari pihak *debt collection* yang mengatasnamakan pihak INCASH. Bahkan mereka juga mempermalukan korban dengan cara mengundang Yuliati ke grup aplikasi WhatsApp yang anggotanya berisi seluruh kontak di ponselnya. Mereka memasang poster foto Yuliati dengan tulisan bahwa ia rela digilir seharga Rp.1.054.000 untuk melunasi hutangnya di aplikasi INCASH

Berdasarkan uraian diatas artikel ini akan membahas tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah empiris. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Data yang dianalisis adalah data primer yang berupa wawancara dengan pihak Staff Direktorat Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* Kantor OJK Pusat; data sekunder yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang - undangan yang selaras dengan penulisan) dan bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum); dan data tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk memperluas dan membuka akses masyarakat terhadap sektor industri keuangan, desain struktur regulasi yang tepat sesuai prinsip kesamaan

dalam memperoleh akses ke dalam industri jasa keuangan merupakan suatu keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank) harus mampu merancang regulasi yang mengandung unsur *stability* (stabilitas), unsur *predictability* (dapat memprediksi), dan unsur *accommodation* (mengakomodasi) berkenaan dengan akses masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam regulasi, realitas di dalam masyarakat tidak akan menyimpang dari apa yang telah diatur melalui akomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech*. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa,

“OJK dibentuk bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”*

OJK memberikan dua (2) macam perlindungan hukum bagi nasabah (Penerima Pinjaman) *Fintech Lending* yang termasuk dalam sektor industri keuangan non-bank yang menjadi korban pelanggaran hukum atas data pribadi mereka yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Jasa Pinjaman. Perlindungan hukum tersebut terdiri atas :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum ini dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa antara beberapa pihak.

- a. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam bentuk “Program Utama” (*Core Actions*) yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu oleh OJK selaku regulator, industri jasa keuangan selaku pelaku usaha jasa keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Berikut lima macam program utama tersebut yaitu, melanjutkan edukasi keuangan secara berkesinambungan dengan memprioritaskan wilayah tertentu, mensinergikan kegiatan edukasi keuangan dengan berbagai program pemerintah maupun program inisiatif nasional, meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai manfaat, risiko, kemudahan, dan keamanan bertransaksi melalui lembaga jasa keuangan, mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan menggalakkan edukasi keuangan mengenai penggunaan layanan keuangan digital untuk transaksi keuangan.

- b. OJK mengeluarkan produk hukum pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
- c. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang ingin menyelenggarakan jasa pinjaman melalui proses dan standardisasi mutu yang telah ditentukan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Dalam melaksanakan perlindungan hukum ini, peran represif yang dilakukan oleh pihak OJK difokuskan kepada dua objek yaitu, *Fintech Lending Legal* dan *Fintech Lending Ilegal*. Adapun perlindungan hukum represif terhadap *Fintech Lending Legal* memiliki prosedur sebagai berikut:

- a. Pengaduan masyarakat/ konsumen kepada OJK dengan menyampaikan kelengkapan dokumen seperti permohonan tertulis, bukti identitas diri, surat hasil tanggapan pengaduan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Kemudian dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surat kepada Direktorat Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau melalui *e-mail* ke alamat konsumen@ojk.go.id.
- b. Setelah OJK menerima aduan tersebut, maka laporan beserta semua kelengkapan berkas akan diperiksa dan dianalisis oleh tim Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan untuk menemukan apakah laporan tersebut memiliki unsur yang memenuhi indikasi sengketa dan kerugian materiil. Jika ditemukan indikasi sengketa dan kerugian materiil, OJK akan melimpahkan kasus tersebut kepada PUJK untuk dilakukan konfirmasi dan investigasi.
- c. Pengaduan yang telah diterima PUJK diklasifikasikan sesuai dengan tingkatan penyelesaian, media informasi Pengaduan, lokasi Pengaduan, kompleksitas materi Pengaduan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dijadikan klasifikasi
- d. PUJK melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan tindak lanjut Penanganan Pengaduan. Unit kerja dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam hal diperlukan, maka PUJK melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran Pengaduan yang dikeluhkan oleh Konsumen. Tingkat penyelidikan/investigasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan Pengaduan yang mencakup frekuensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Setelah PUJK melakukan verifikasi dan investigasi maka bentuk penyelesaian Pengaduan ditindaklanjuti dengan membaginya

- menjadi tiga bagian yaitu, pengaduan yang diyakini tidak benar, pengaduan yang diyakini benar, dan pemberian ganti rugi.
- e. Pihak OJK akan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara memanggil pihak PUJK dengan konsumen untuk membantu pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu kesepakatan. Pada tahap ini OJK hanya berperan sebagai fasilitator antara dua pihak yang bermasalah.
 - f. Pihak OJK akan melaksanakan koordinasi melalui verifikasi dan klarifikasi kepada pihak konsumen mengenai status aduan sengketa tersebut. Apabila konsumen menolak penyelesaian pengaduan yang diusulkan oleh pihak PUJK, maka PUJK wajib menginformasikan bahwa konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Layanan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang ditawarkan oleh OJK dilaksanakan tiga cara. Pertama, mediasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Kedua, lewat adjudikasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud, putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Ketiga, lewat arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
 - g. Penanganan pengaduan dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. Dalam sistem ini, terdapat dua fitur utama yang disediakan bagi konsumen dan PUJK yaitu *Trackable* dan *Traceable*. *Trackable* adalah fasilitas bagi konsumen untuk memantau tindak lanjut penanganan pengaduan yang telah disampaikan kepada OJK. *Traceable* adalah fasilitas bagi PUJK untuk memantau, mengambil alih, menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan konsumen melalui OJK. Sistem ini dapat diakses melalui *website* www.konsumen.ojk.go.id oleh pihak konsumen maupun PUK itu sendiri agar kedua belah pihak dapat mengetahui kelanjutan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak OJK Pusat.
 - h. Jika pihak PUJK tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, pihak OJK akan mengirimkan konfirmasi laporan hasil penyelesaian sengketa kasus tersebut kepada pihak Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia dan akan ditinjau selama tiga hari. Pada jangka waktu itu, AFPI akan merekomendasikan OJK untuk melakukan tindakan sesuai dengan tingkatan pelanggaran kode etik *Fintech Lending* terkait. Terdapat empat tindakan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak asosiasi. Pertama, peringatan tertulis bersifat tertutup. Kedua, pemberitahuan kepada masyarakat dan OJK. Ketiga, penonaktifan keanggotaan sementara. Terakhir, penghentian keanggotaan secara permanen.

Adapun perlindungan hukum represif terhadap *Fintech Lending* Ilegal memiliki prosedur dan dapat diketahui, sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan dari konsumen/ masyarakat kepada OJK melalui *website* <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>, menghubungi nomor telpon 157, mengirim *e-mail* ke alamat waspadainvestasi@ojk.go.id, atau dapat mendatangi langsung kantor OJK di regional kota masing-masing. Selain itu masyarakat dapat melapor langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum.
2. Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi diawali dari hasil laporan masyarakat kepada OJK maupun hasil pantauan langsung dari Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam melakukan penanganan, Satgas Waspada Investasi terlebih dahulu mengadakan rapat terkait perusahaan *Fintech Lending* ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut anggota Satgas Waspada Investasi secara bersama-sama memeriksa untuk mengumpulkan data-data secara lengkap mengenai perusahaan *Fintech Lending* yang diduga ilegal tersebut. Dalam melakukan tugasnya Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kominfo untuk menyisiri dan mengulik setiap sisi internet yang memiliki tendensi kepada hal tersebut. Apabila semua informasi terkumpul dan semua bukti mengarah kepada *Fintech Lending* ilegal maka Satgas Waspada Investasi akan berkoordinasi dengan OJK, Google dan Apple untuk memblokir situs dan aplikasi tersebut.
3. Setiap satu bulan OJK akan mengeluarkan daftar entitas *Fintech Lending* ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi dengan menggugah siaran pers di *website* resmi OJK. Rincian daftar tersebut berupa *platform, developer, email developer, url website, dan url playstore/ appstore*. Informasi yang didapat masyarakat melalui publikasi siaran pers akan sangat menguntungkan, karena melalui ini masyarakat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar maupun berizin di OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.
4. Korban *Fintech* ilegal dapat melapor ke Bareskrim Polri apabila pihak penyelenggara jasa *Fintech* ilegal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti ancaman, fitnah, penipuan, pencemaran nama baik, hingga pelecehan seksual. Hal ini dilakukan apabila masyarakat yang menjadi korban melapor kepada pihak kepolisian dengan membawa alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban intimidasi maupun penipuan yang dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology* atau pinjaman *online* ilegal.

D. Simpulan

Tugas pokok dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen yang menjadi korban pelanggaran hukum atas data pribadi mereka

yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Jasa Pinjaman atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada *Fintech Lending* berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaan peran tersebut, OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan Satgas Waspada Investasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas Industri Keuangan Non-Bank.

E. Saran

Pemerintah Cq, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera:

1. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengingat pada saat ini regulasi mengenai perlindungan dan penggunaan data masih tersebar dalam beberapa aturan. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dirasa sangat dibutuhkan keberadaannya karena saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi *lex specialis* mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis *Fintech Lending*.
2. Membentuk Rancangan Undang-Undang *Financial Technology* agar memperjelas landasan hukum industri keuangan berbasis teknologi. Kehadiran Undang-Undang *Financial Technology* nantinya dapat menjadi sumber hukum nasional dalam menjamin perlindungan hukum konsumen apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan *Fintech* karena Undang-Undang tersebut memuat mengenai aturan sanksi denda maupun pidana dalam pelaksanaan kegiatan bisnis *Financial Technology*.

F. Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto. 2010. "*Sosiologi Suatu Pengantar*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

- Wahyudi Djafar. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Mimbar Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Hukum UGM
- Farah Margaretha. 2015. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 514. No 516. Yogyakarta: UMY Press
- R.E. Latumahina. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume 3. Nomor 2. Surabaya: Law Review UPH Surabaya
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-fintech-di-solo-wanita-dijual-via-whatsapp-demi-bayar-utang.html>, diakses pada tanggal 10 September 2019 Pukul 18.17.